



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/1/2019
TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN WALIKOTA MADIUN
PERIODE TAHUN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014-2019 dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka Walikota Madiun wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- b. bahwa sehubungan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir

Masa Jabatan dimaksud dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 26 Oktober 2018 Nomor 170/2872/401.040/2018 Perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
 2. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 28 November 2018 Nomor 170/3176/401.011/2018 Perihal Pemberitahuan Masa Akhir Jabatan Walikota Madiun;
 3. Surat Walikota Madiun tanggal 19 Desember 2018 Nomor 130/4201/401.011/2018 Perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014-2019;
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 26 Desember 2018 dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014-2019;
 5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 27 Desember 2018 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014-2019;
 6. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun pada tanggal 21 Januari 2019 dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014-2019;
 7. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 25 Januari 2019 dengan acara Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014-2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Dengan keputusan ini memberikan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014-2019.

- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU”
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 25 Januari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN
Ketua,**



Drs. ISTONO, M.Pd

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : 188-401.040/1/2019

TANGGAL : 25 JANUARI 2019

REKOMENDASI DPRD KOTA MADIUN ATAS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

AKHIR MASA JABATAN WALI KOTA MADIUN

PERIODE TAHUN 2014- 2019

I. PENGANTAR

Mengakhiri pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan periode 2014-2019, Wali Kota Madiun selaku Kepala Daerah telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Wali Kota Madiun Periode Tahun 2014-2019 kepada DPRD Kota Madiun, selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk memahasnya secara internal sesuai tata tertib DPRD, pembahasan tersebut kemudian menghasilkan catatan dan rekomendasi strategis atas implementasi kebijakan daerah yang telah di jalankan oleh Wali Kota Madiun selama 5 tahun, yang diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kebijakan pembangunan pada masa yang akan datang.

Sebagaimana yang disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Wali Kota Madiun dalam bab Pendahuluan, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Periode Tahun 2014-2019 merupakan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 dan penjabaran dari Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025. Oleh karena tahun berakhirnya RPJMD adalah tahun 2019, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah kepada DPRD ini menyajikan informasi realisasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 4 tahun anggaran yang merupakan ringkasan LKPJ Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Disamping itu, penyusunan dokumen LKPJ AMJ ini pada sat akhir tahun 2018 dan berakhirnya periode RPJMD tahun 2019, maka data-data dan informasi yang tersaji dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) ini merupakan data sampai dengan akhir bulan Nopember 2018.

II. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL DAERAH

Sebagaimana yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Wali Kota Madiun Periode Tahun 2014-2019, bahwa Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut :

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2018**	12.209.126,3	9.488.074,2
2017	12.140.200,5	9.486.136,6
2016	11.185.109,4	8.954.697,1
2015	10.192.067,5	8.455.436,3
2014	9.214.100,7	7.965.267,8

Sumber : PDRB Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BPS Kota Madiun

***) Angka sangat sementara, Tim Penyusun dan Perumus AMJ Kota Madiun

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2014-2018 (%)

Kategori		2014	2015	2016	2017	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,98	1,58	1,31	-1,78	-1,66
B	Pertambangan dan Penggalian	1,69	1,98	1,91	2,31	2,31
C	Industri Pengolahan	7,74	6,51	7,21	8,00	8,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,29	3,73	3,86	4,91	4,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	2,58	3,82	6,84	6,84
F	Konstruksi	4,98	5,48	4,44	5,57	5,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,46	4,48	5,11	5,83	5,83
H	Transportasi dan Pergudangan	8,45	6,78	7,13	8,18	8,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	7,28	7,30	7,47	7,47
J	Informasi dan Komunikasi	8,13	8,13	6,64	6,77	6,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,81	7,52	7,11	3,88	3,88
L	Real Estate	6,76	6,76	5,64	4,22	4,22
M,N	Jasa Perusahaan	8,41	8,41	5,94	6,34	6,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,78	3,88	3,05	2,46	2,46
P	Jasa Pendidikan	7,71	6,30	5,14	4,50	4,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,87	9,35	5,85	5,93	5,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,19	4,28	4,17	4,14	4,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,62	6,15	5,90	5,93	5,96

Sumber : PDRB Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BPS Kota Madiun

***) Angka sangat sementara, Tim Penyusun dan Perumus LKPJ AMJ Kota Madiun

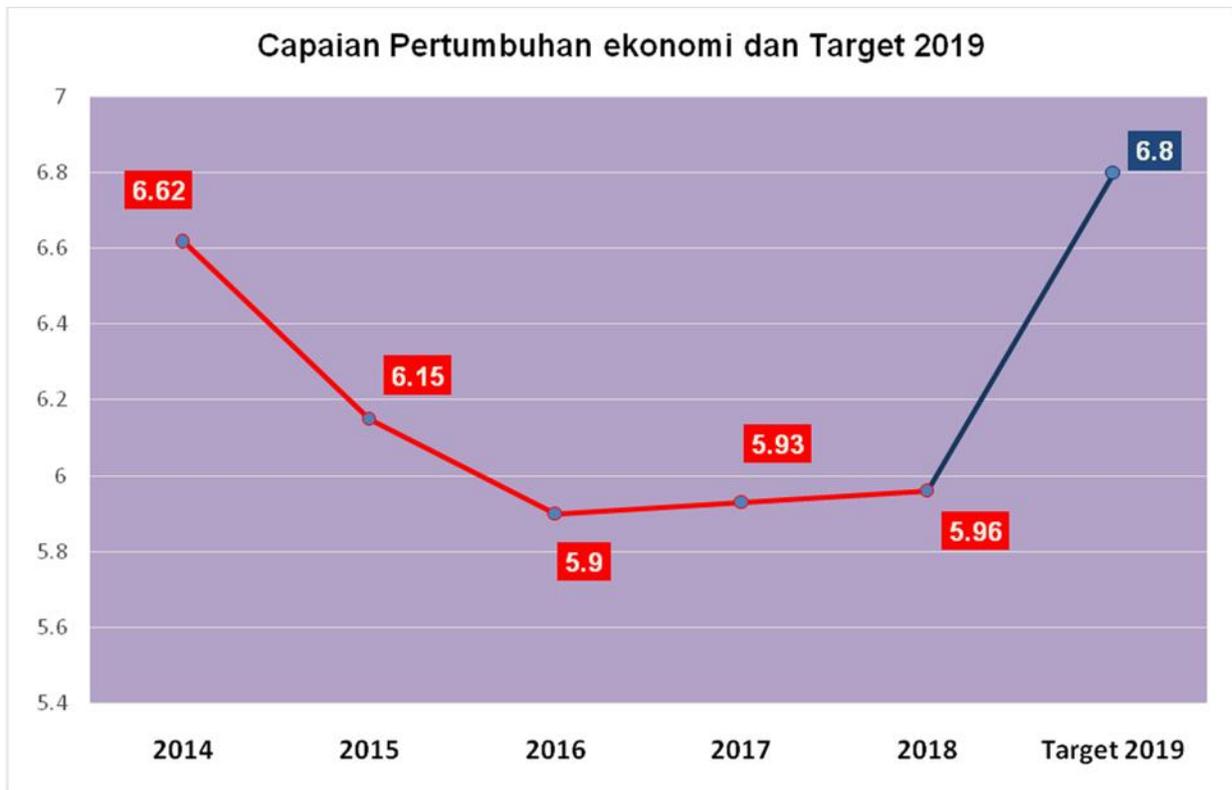
Berdasarkan data-data perkembangan ekonomi makro yang dilaporkan dalam Bab I dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Wali Kota Madiun 2014 – 2019, dapat di ketahui bahwa,

secara agregat kondisi perekonomian Kota Madiun antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, meliputi: PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, tingkat kemiskinan dan IPM. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sampai dengan tahun 2018 atau tahun ke 4 (empat) pelaksanaan RPJMD 2014-2019, PDRB terus mengalami peningkatan baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, tahun 2018 mencapai Rp. 12.209.126,3 atas harga berlaku dan PDRB harga konstan Rp. 9.488.074,2 namun demikian untuk laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun ke dua RPJMD yaitu tahun 2015 bergerak menurun kemudian cenderung stagnan pada 3 (tiga) tahun terakhir RPJMD (2016, 2017 dan 2018), pertumbuhannya cenderung stagnan pada angka 5,9% (tahun 2016 ekonomi tumbuh 5,90%, 2017 5,93% dan tahun 2018 per nopember ekonomi tumbuh sebesar 5,96%. Berikut data capaian indicator makro dan grafik tren nya :

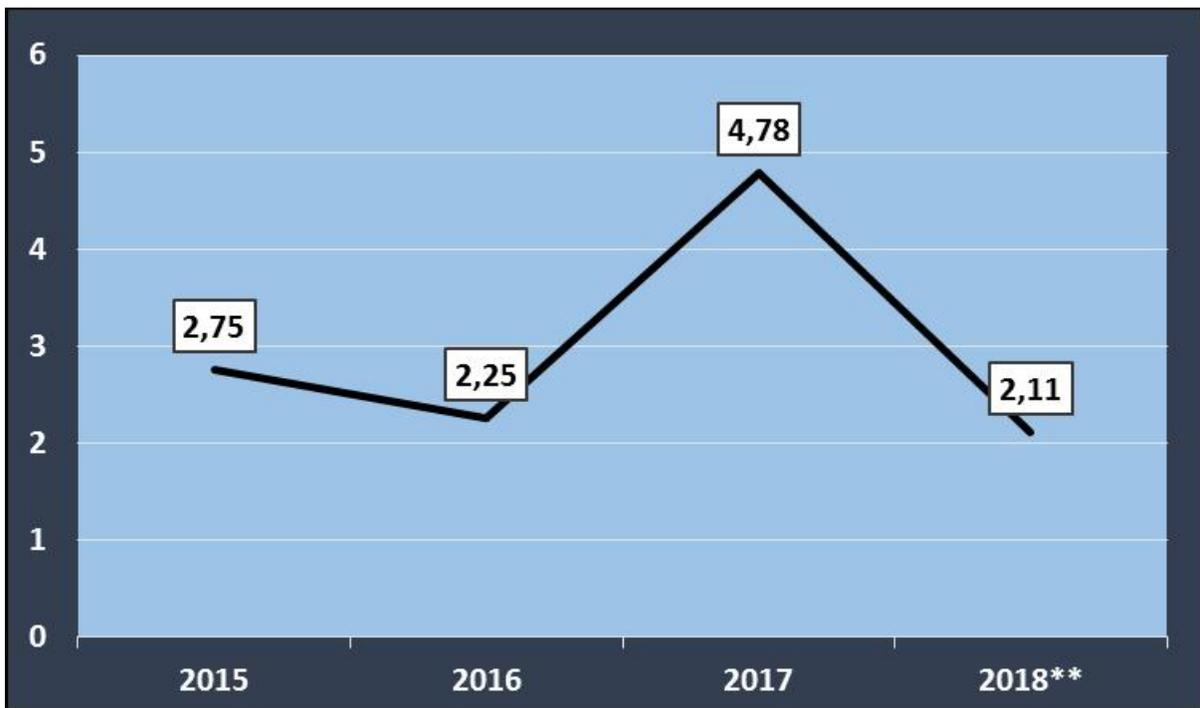


- Sedangkan target akhir RPJMD yaitu tahun 2019 sebesar 6,8%, maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagaimana tabel diatas, maka target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 6,8% tersebut dirasa cukup berat, oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk mencapainya.

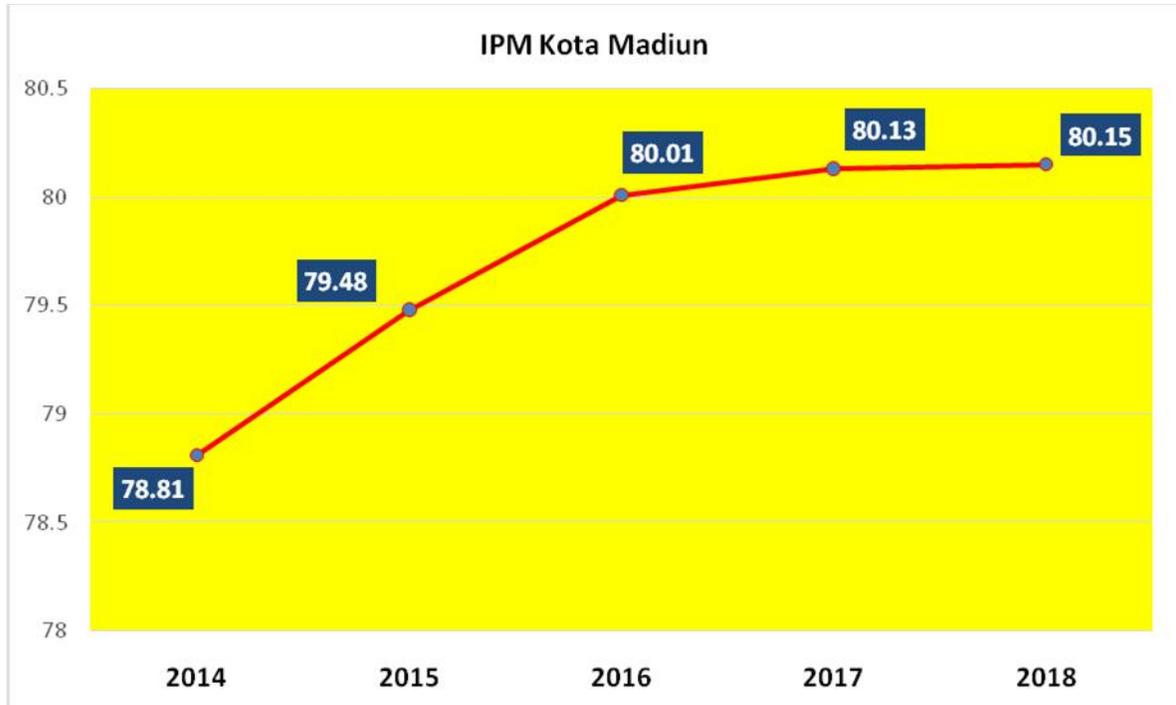


- Selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2014 – 2018 inflasi fluktuatif cenderung menurun. Pada awal tahun RPJMD inflasi dapat ditekan dibawah 3%, bahkan tahun 2018 dapat ditekan sampai dengan 2,11%, namun pada tahun 2017 kembali meningkat, dimana Inflasi hampir 5% atau sebesar 4,78%. Peningkatan inflasi tentu dampaknya akan menggerus daya beli masyarakat, apalagi jika pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan (sama dengan tahun sebelumnya). Untuk itu diperlukan kebijakan yang efektif mampu mengendalikan inflasi daerah setiap tahunnya, agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas.

**Perkembangan Tingkat Inflasi
Kota Madiun Tahun 2014-2018**



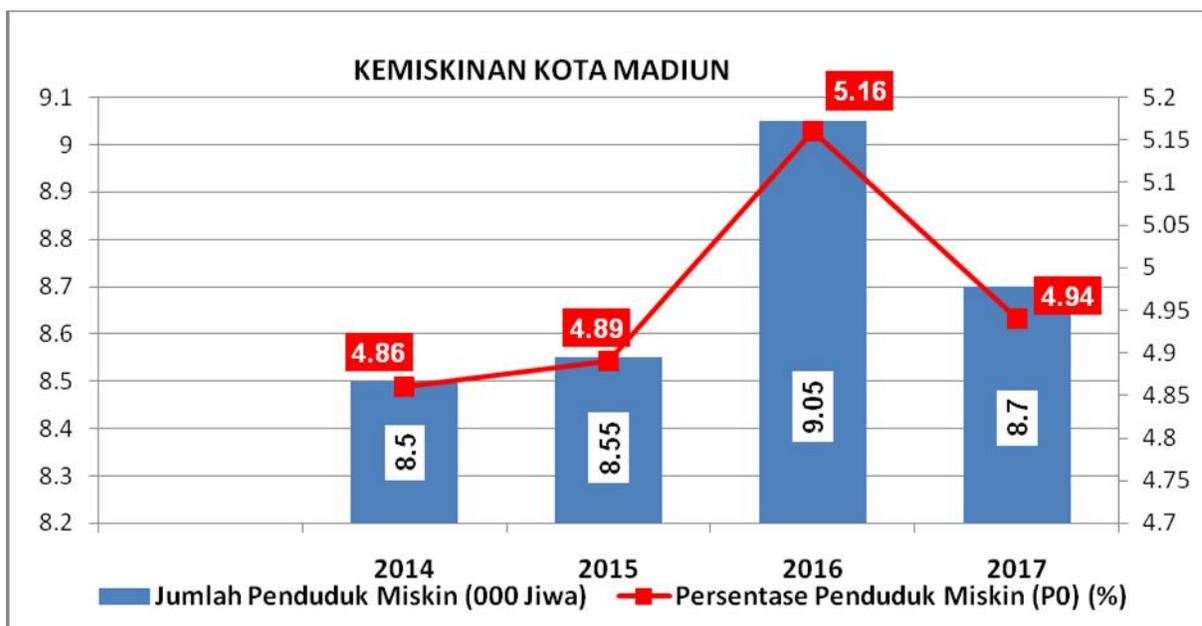
- IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Madiun tahun 2018 mencapai 80,15 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Merupakan indikator yang umum digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Artinya, naik turunnya angka IPM menandakan kondisi hasil pembangunan manusia di daerah tersebut, apakah mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Berikut data capaian IPM Kota Madiun Tahun 2014-2018:



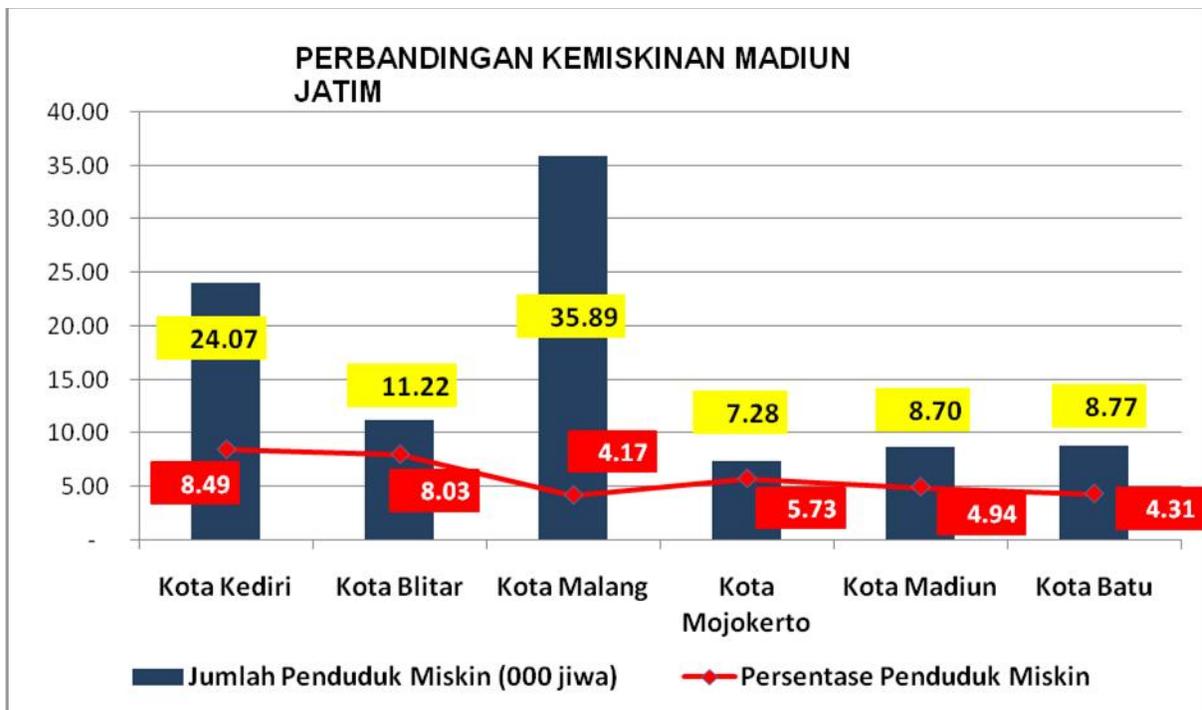
- Kinerja penanggulangan kemiskinan 4 tahun terakhir masih lamban dan belum cukup menggembirakan hasilnya. Prosentase penduduk miskin capaiannya fluktuatif cenderung meningkat, dimana tahun 2014 angka kemiskinan 4,86% dan sampai tahun 2017 kemiskinan sedikit meningkat menjadi 4,94%.

Kemiskinan Kota Madiun 2014 – 2017

	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	8,5	8,55	9,05	8,7
Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	4,86	4,89	5,16	4,94



- Kinerja penanggulangan kemiskinan lamban dan belum cukup mengembirakan. Hasilnya tersebut menjadi indikasi bahwa meningkatnya PDRB perkapita setiap tahun belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk. Angka kemiskinan sampai dengan tahun 2017 jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur prosentasenya masih dibawah Kota Malang dan Kota Batu, berikut disajikan data perbandingannya :



Rekomendasi:

1. Agar pertumbuhan ekonomi Kota Madiun meningkat lebih progresif, sesuai kewenangannya diharapkan Pemerintah Kota Madiun kedepan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain melalui:
 - **Peningkatan konsumsi masyarakat** dengan cara menjaga agar daya beli masyarakat tidak turun (misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat, memperlancar pasokan barang dan perluasan lapangan kerja).
 - **Meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif** dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD agar lebih produktif.
 - **Peningkatan investasi daerah** dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.

2. Untuk penanganan kemiskinan yang lamban dan belum menggembirakan hasilnya, hendaknya Pemerintah Kota Madiun segera mengevaluasi ulang seluruh program dan kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara - cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin.
3. Data kemiskinan per kelurahan/kecamatan tidak disajikan, harusnya dokumen LKPJ juga menyajikan informasi dimana kantong kemiskinan (minimal per-kecamatan) berada, untuk itu agar disampaikan data kemiskinan paling update sampai per-kecamatan atau per-kelurahan/RW/RT di Kota Madiun sehingga petanya jelas. Dengan demikian akan memudahkan dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan (efektifitas kegiatan).

III. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH:

Tingkat realisasi pendapatan daerah selama 4 tahun periode anggaran, yaitu tahun 2014 - 2017 realisasinya selalu melampaui target (realisasi pendapatan daerah melampaui target dari APBD penetapan), kecuali tahun 2016 dimana realisasi pendapatan tidak memenuhi target, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Ringkasan Realisasi Pendapatan daerah
Kota Madiun 2014 - 2017**

Tahun Realisasi	Target	Realisasi	
2014	857.410.749.000	938.517.341.039	109,5%
2015	963.729.664.000	973.919.348.172	101,1%
2016	1.041.580.666.000	998.282.330.538	95,8%
2017	940.781.952.000	957.624.973.325	101,8%
2018	915.903.804.337	923.789.668.381	100,8%

- Dari tabel perbandingan antara target dan realisasi diatas, kecuali tahun 2014, nampak bahwa nilai pelampauan atas targetnya kecil (kurang dari 5 %), maka atas pelampauan target pendapatan tentu patut diapresiasi sepanjang bahwa ketika target di tetapkan sudah berdasarkan potensi pendapatan riilnya, namun jika belum (target pendapatan diproyeksi lebih rendah dari potensi riilnya) maka kecilnya pelampauan ini tentu patut di evaluasi baik dari sisi perencanaan (metode penentuan target) maupun manajemen pengumpulannya.

- Berbeda dengan pendapatan daerah, tingkat realisasi belanja daerah selama tahun 2014 – 2018 fluktuatif cenderung sangat rendah, bahkan pada tiga tahun terakhir RPJMD realisasinya dibawah 80%. Rendahnya prosentase realisasi belanja daerah tersebut berdampak semakin besarnya dana yang tidak terserap. Pada tahun 2017 dana tidak terserap sebesar Rp. 289 Miliar lebih, sedangkan 2 tahun sebelumnya dana tidak terserap lebih besar lagi. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Ringkasan Realisasi Belanja daerah
Kota Madiun 2014 – 2018**

Tahun Realisasi	Target	Realisasi	SALDO	%
2014	1.026.890.016.000	853.473.318.174	(173.416.697.826)	83,1%
2015	1.203.259.138.293	877.219.888.407	(326.039.249.885)	72,9%
2016	1.380.715.845.353	1.031.564.193.296	(349.151.652.056)	74,7%
2017	1.246.639.438.594	957.624.973.325	(289.014.465.269)	76,8%
2018	1.081.763.362.492	787.570.886.680,92	(294.192.475.811)	72,8%

- SILPA tahun berjalan pada empat tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2014 - 2017 masih sangat tinggi. Proporsinya terhadap dana tersedia masih diatas 20%, artinya serapan anggaran daerah selama 4 tahun terakhir memang masih sangat rendah, artinya silpa tahun berjalan belum mengindikasikan efisiensi dan efektifitas belanja daerah. Akan tetapi patut diduga kuat bahwa besarnya silpa tahun berjalan tersebut, lebih banyak bersumber dari beberapa kegiatan yang gagal dilaksanakan, atau karena perencanaan yang belum akurat. Berikut grafik tren silpa tahun berjalan tahun 2013 - 2017:

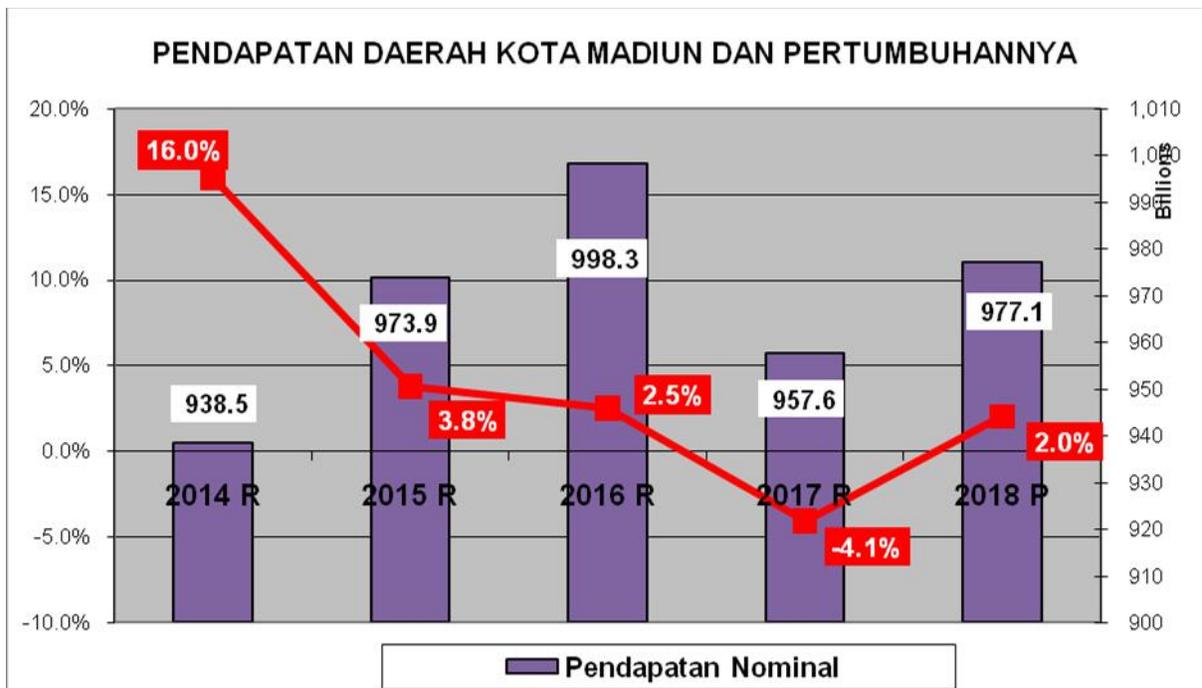


- Tingginya nilai SILPA tahun berjalan selama waktu implementasi RPJMD 2014-2019 tersebut, sebenarnya mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Madiun belum menemukan cara yang efektif untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang ada berupa dana pembangunan, menggerakkan organisasi dan tata kerja yang profesional untuk akselerasi pembangunan menjawab berbagai hambatan dan tantangan daerah.
- Untuk itu **direkomendasikan** agar kebijakan pengelolaan keuangan daerah utamanya manajemen kas harus diperbaiki. Perbaikan perencanaan anggaran juga terus dilakukan agar lebih akurat dalam pelaksanaannya, sehingga silpa tahun berjalan besarnya wajar dan merupakan hasil dari efisiensi dan efektifitas belanja.

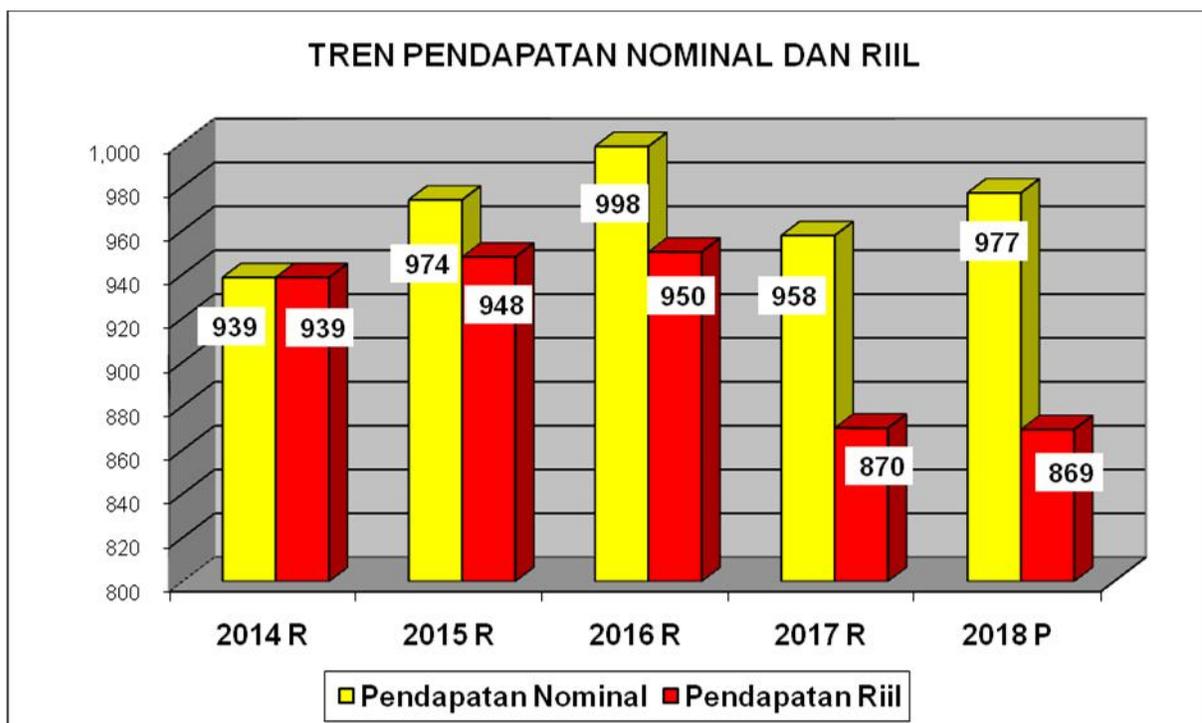
Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 – 2018:

A. Kinerja Pendapatan Daerah:

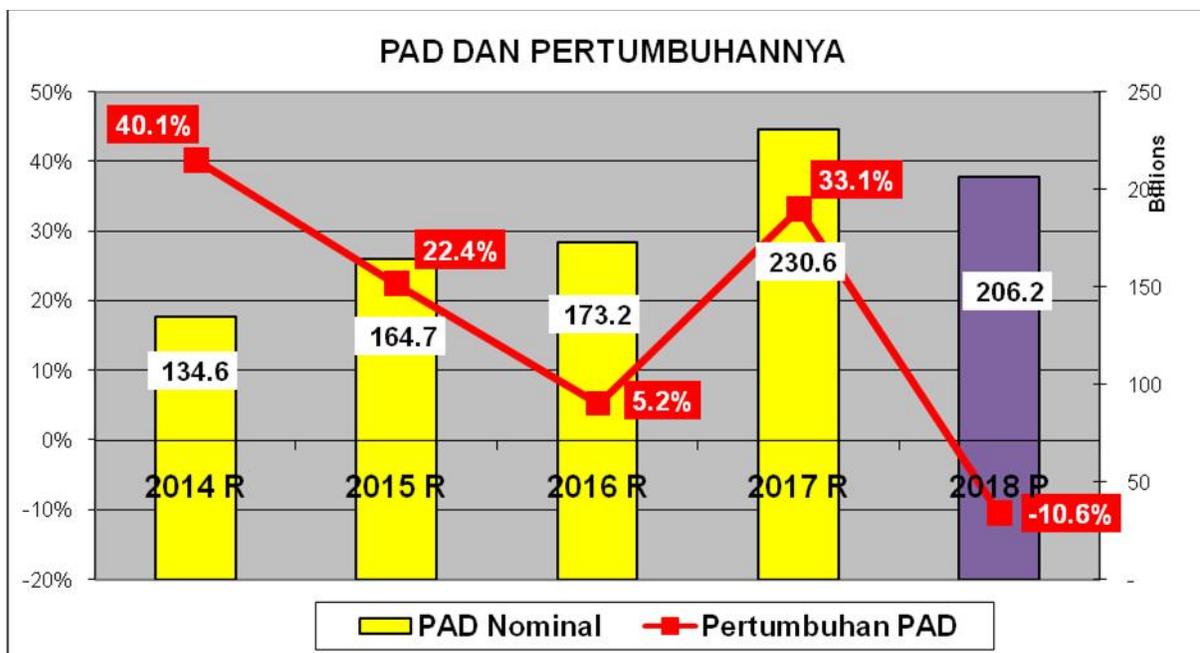
- **Kinerja agregat pendapatan daerah antara 2014-2018 belum cukup membanggakan, Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah antara tahun 2014 – 2017 dan Perubahan 2018 fluktuatif cenderung menurun,** antara tahun 2015 – 2018 Pendapatan daerah hanya mampu tumbuh dibawah 4%, bahkan tahun 2017 sempat tidak tumbuh atau tumbuh negatif 4,1%. Berikut grafik tren pendapatan Kota Madiun Tahun 2014 – 2017 :



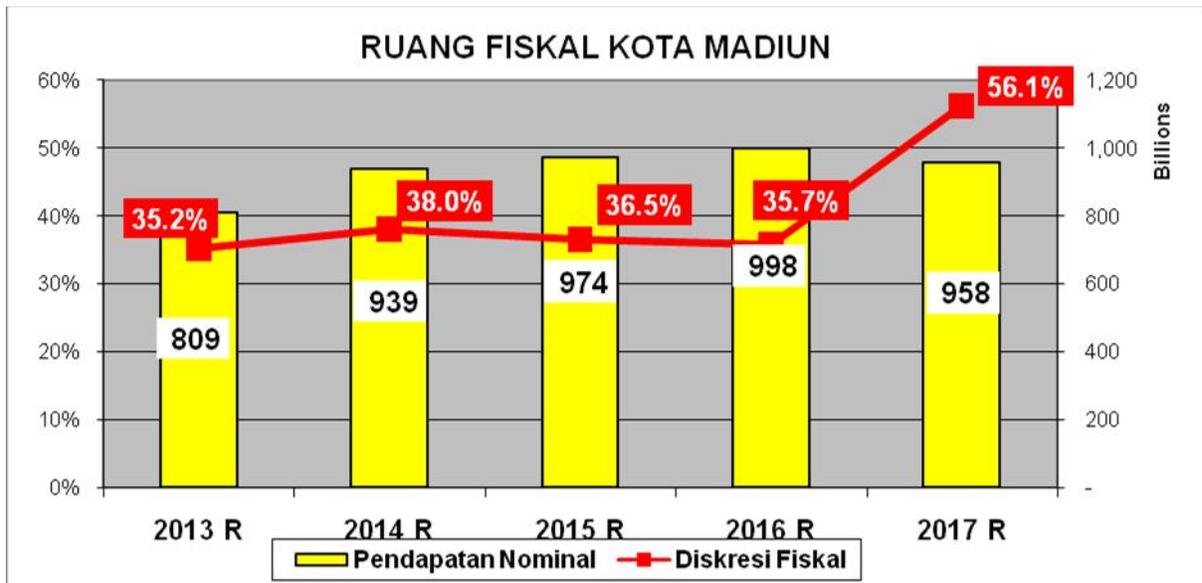
- Dengan tingkat inflasi daerah sebagaimana yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) antara yang terendah 2,1% dan tertinggi 7,4% pertahunnya, maka pertumbuhan pendapatan tersebut belum cukup berkualitas, artinya pertumbuhan pendapatan daerah tergerus oleh angka inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Sebagaimana yang nampak pada grafik berikut ini, dimana pendapatan riil tahun 2017 dan 2018 menurun tinggal Rp. 870 Miliar an saja (pendapatan riil adalah pendapatan setelah disesuaikan dengan angka deflator inflasinya, dengan tahun n 2014). Disinilah urgensinya menjaga inflasi daerah agar terkendali rendah, artinya pertumbuhan nominal pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan meningkat secara moderat, sehingga pendapatan riil daerah tidak tergerus oleh besaran inflasi yang terjadi.



- **Kinerja PAD Tahun Anggaran 2014 - 2017 belum cukup membanggakan, pertumbuhannya fluktuatif cenderung menurun,** kecuali tahun 2014, 2015 dan 2017 pertumbuhannya cukup progresif, tumbuh diatas 20%, namun pada tahun 2015 hanya mampu tumbuh 5,2% dan tahun 2018 diproyeksi tidak tumbuh atau **minus 10,6%**. Berikut data capaian tren pendapatan daerah dan PAD Kota Madiun lima tahun terakhir:



- Hal yang cukup menggembirakan adalah : **pada tahun 2017 Ruang fiskal Kota Madiun meningkat cukup tinggi mencapai 56,1% setelah stagnan pada tahun 2013- 2016.** Ruang fiskal merupakan ruang gerak yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan anggarannya. Perhitungan ruang fiskal diperlukan untuk menentukan arah kebijakan anggaran setiap tahunnya. Dengan ruang fiskal yang lebar maka daerah semakin leluasa dalam membiayai program-program unggulan daerah (Program kreasi daerah dan unggulan). Berikut disajikan grafik tren ruang fiskal Kota Madiun Tahun 2013- 2017:



- o Dari grafik diatas nampak bahwa, sampai dengan realisasi APBD tahun 2017 dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 958 Miliar lebih, ruang fiskalnya diatas 50% atau sebesar 56,1%, trennya meningkat tajam setelah sempat stagnan antara tahun 2013-2016. Hal ini berarti bahwa keleluasaan mengelola anggaran pada tahun 2017 meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya, artinya pada tahun tersebut semakin banyak tersedia anggaran untuk membiayai program – program mandiri dan unggulan atas kreatifitas sendiri, sesuai kebijakan dan karakteristik daerah. Untuk itu disarankan agar kondisi ruang fiskal diatas 50% tersebut dapat dijaga untuk tahun selanjutnya, disamping itu juga dalam penentuan kebijakan belanja daerah tetap memilih strategi **alokasi anggaran yang terkonsentrasi** (*money follow program*) bukan anggaran berdasarkan plafonnya (**strategi plafon anggaran**). Dengan demikian penggunaan pendapatan lebih fokus dan terarah memenuhi kebutuhan sesuai permasalahan dan isu strategis daerah, mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

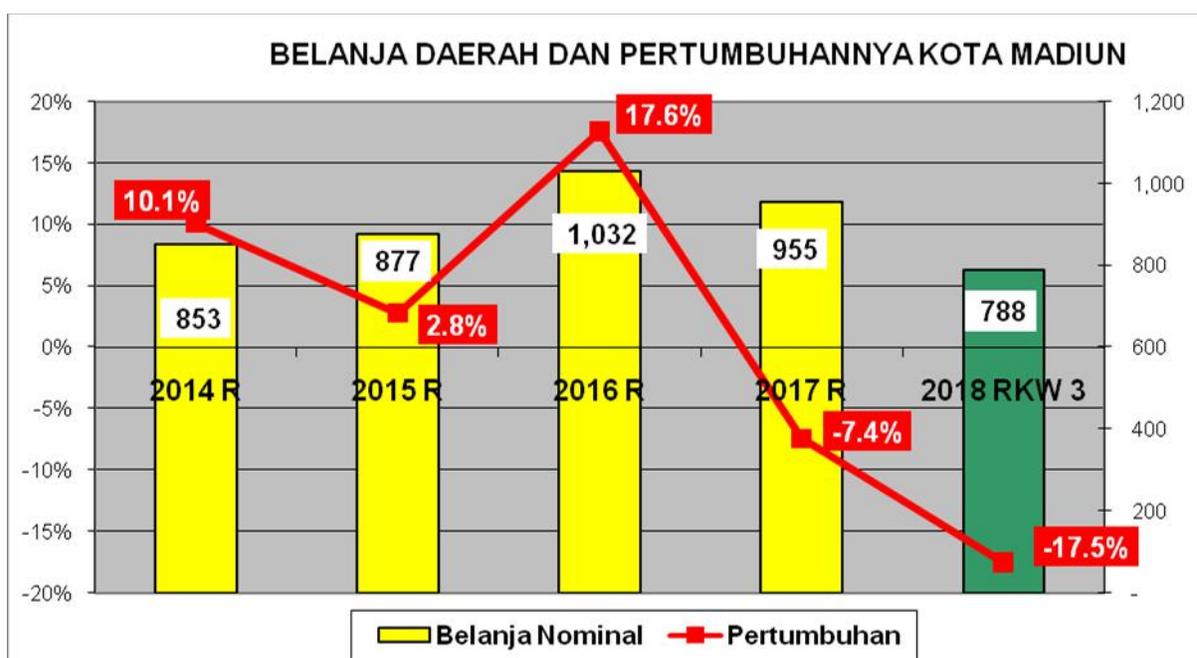
Rekomendasi:

- Kinerja PAD yang belum cukup membanggakan tersebut, hendaknya menjadi perhatian yang serius dari Pemerintahan Kota Madiun agar kedepan kinerjanya lebih baik lagi. Untuk itu kebijakan pendapatan khususnya kebijakan PAD tahun 2014 - 2018 yang benar benar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dilanjutkan, tentu setelah dievaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya. Kebijakan yang bersifat tradisional harus segera di gantikan dengan yang lebih modern, cara yang lebih modern diperlukan agar manajemen PAD lebih akuntabel sehingga kebocoran saat pengumpulan pendapatan dapat ditekan seminimal mungkin dan potensi yang masih tersembunyi untuk didayagunakan. Cara yang lebih akuntabel seperti pemanfaatan IT (teknologi aplikasi dalam perencanaan dan pengumpulan PAD), penggunaan data base yang selalu update, penegakan hukum, research dan pengembangan, Reward dan Punishment pada pengelolaan PAD, dengan demikian diharapkan kinerja PAD untuk lima tahun yang akan datang akan lebih membanggakan.
- Selain upaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di implementasikan, diperlukan terobosan kebijakan yang cukup kreatif. Dari struktur alokasi pembiayaan tahun 2017 dan juga APBD tahun 2018 nampak bahwa Pemerintah Kota Madiun selama ini masih sangat konvensional dalam mengelola pembiayaan pembangunan, untuk membangun daerahnya hanya mengandalkan dana yang di dapat saja yaitu dari sumber PAD dan transfer dana perimbangan baik pusat maupun transfer dari provinsi. Belum cukup kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya seperti utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan aset daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya. Seharusnya pada masa yang akan datang pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah, utamanya untuk pemenuhan percepatan infrastruktur dasar publik dan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan penurunan angka kemiskinan, pemerintah daerah menempuh cara yang lebih modern/tidak konvensional dengan memanfaatkan salah satunya instrument pembiayaan pembangunan ini.

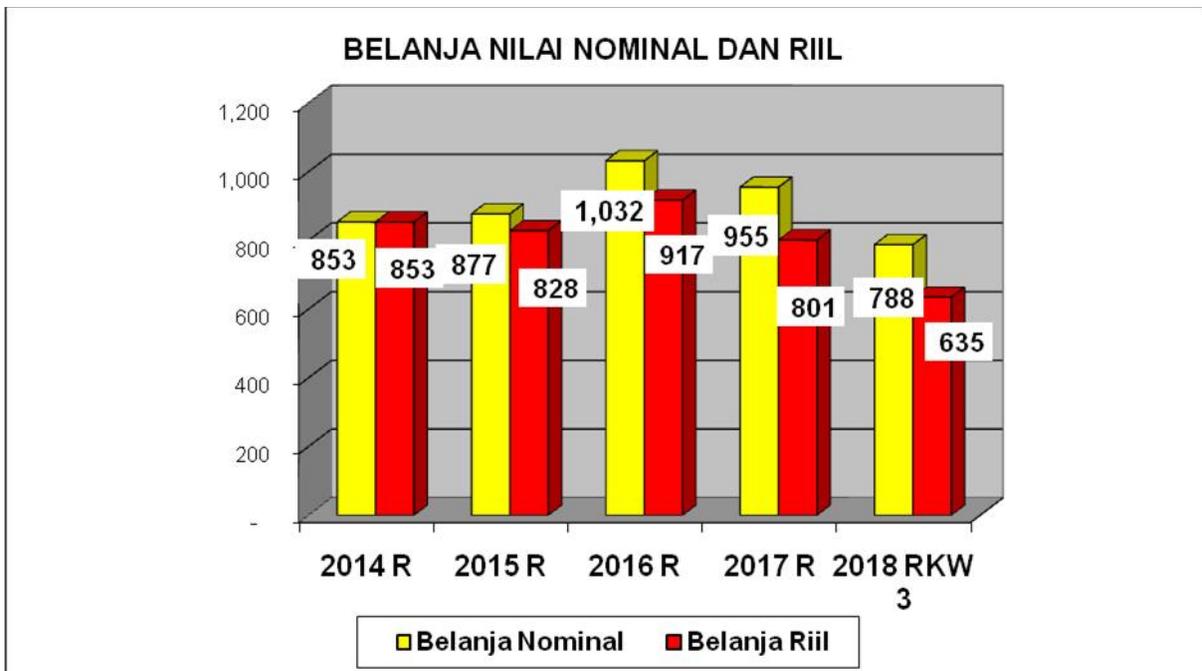
- Tidak banyak yang dapat diketahui apa permasalahan dan solusi pengelolaan pendapatan daerah antara Tahun Anggaran 2014 – 2018, karena minimnya informasi tentang identifikasi masalah dan solusi yang di sajikan dalam bab ini. Akibatnya tidak diketahui hambatan dan tantangan pengelolaan pendapatan daerah selama ini. Perlu digali lebih dalam tentang apa permasalahan dan solusi pengelolaan pendapatan daerah Kota Madiun selama kurun 2014-2019 dari sisi *good governance* APBD seperti: Regulasi keuangan daerah, penatausahaan dan pelaporan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila permasalahan dan solusi pengelolaan APBD periode RPJMD yang lalu dapat diidentifikasi, maka akan menjadi dasar rumusan perbaikan kebijakan anggaran untuk RPJMD tahun yang akan datang.

B. Kinerja Belanja Daerah

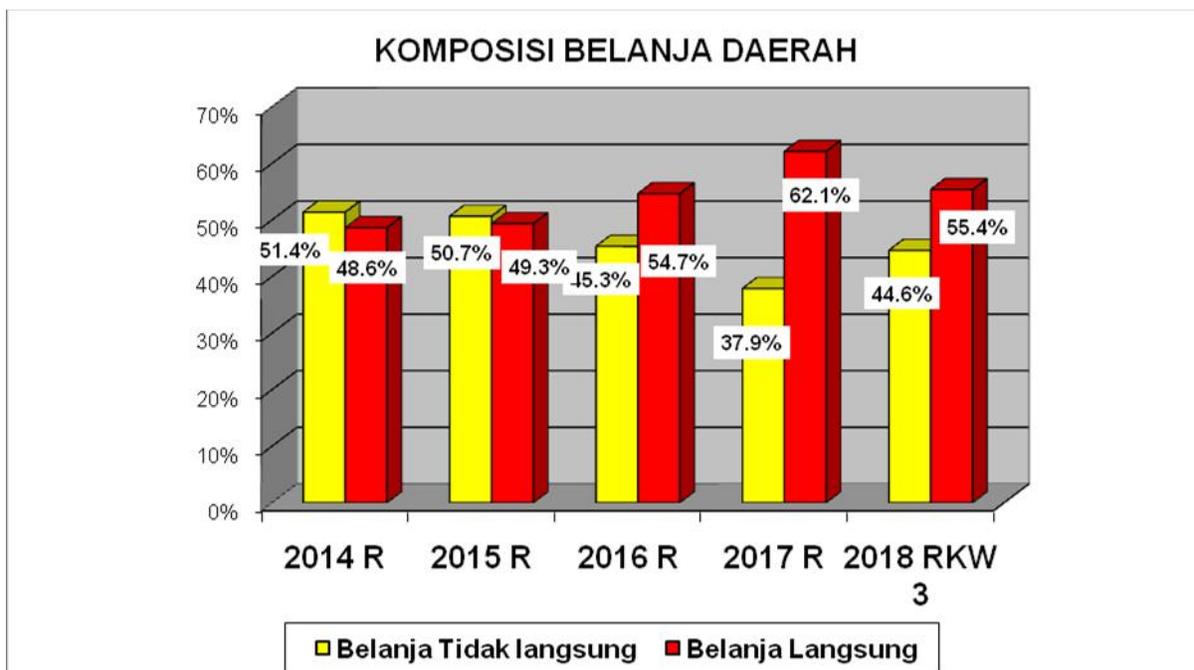
Hampir sama dengan kinerja pendapatan, **Pertumbuhan realisasi belanja daerah antara tahun 2014 – 2017 dan tahun 2018 realisasi kuartal III fluktuatif cenderung menurun pada dua tahun terakhir.** Atas penurunan pertumbuhan belanja daerah pada tahun tahapan akhir RPJMD, patut disesalkan bahwa pada saat hampir akhir RPJMD dimana saat diperlukan percepatan pembangunan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, seharusnya kinerja belanja meningkat, akan tetapi pertumbuhannya justru menurun. Berikut Grafik tren belanja Kota Madiun Tahun 2014 – 2017 dan realisasi kuartal 3 tahun 2018 sebagai berikut:



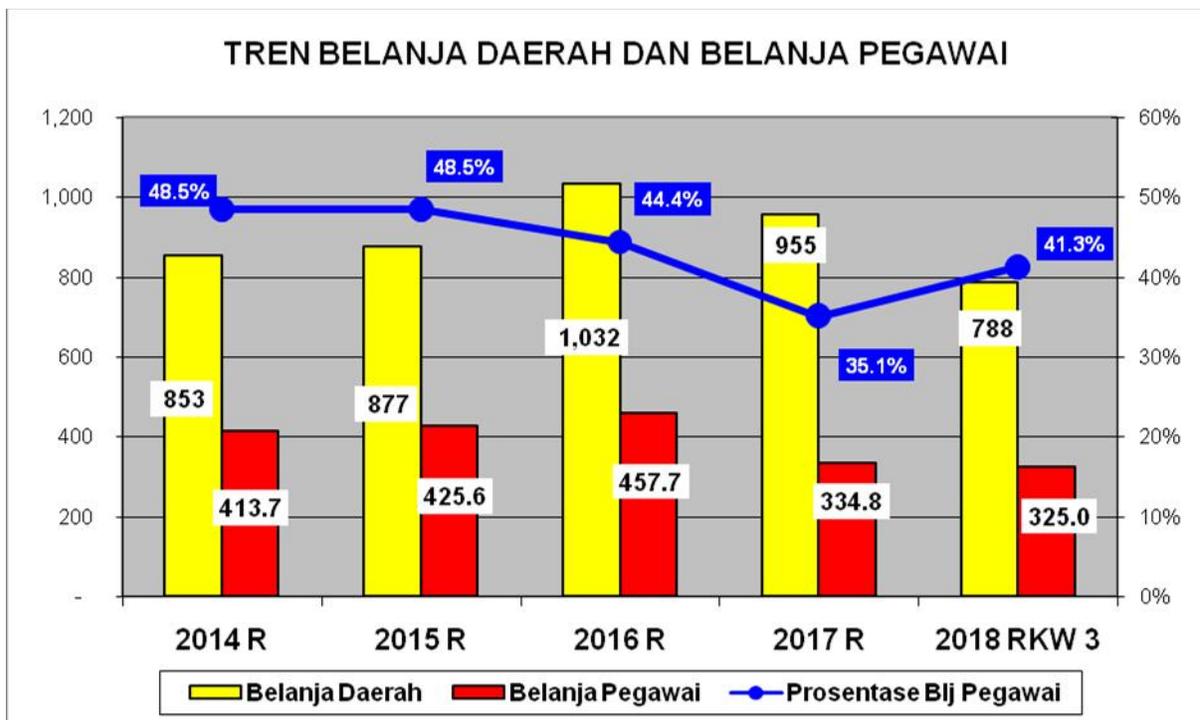
- Dengan tingkat inflasi daerah sebagai mana yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ AMJ antara yang terendah 2,1% dan tertinggi 7,4% pertahunnya, maka pertumbuhan belanja belum cukup berkualitas, artinya pertumbuhan belanja daerah tergerus oleh angka inflasi yang terjadi setiap tahunnya, sehingga nilai riil belanja daerah menurun. Sebagaimana yang nampak pada grafik berikut tampak bahwa belanja riil tahun 2017 nilai riil nya lebih rendah dari belanja riil tahun 2015.



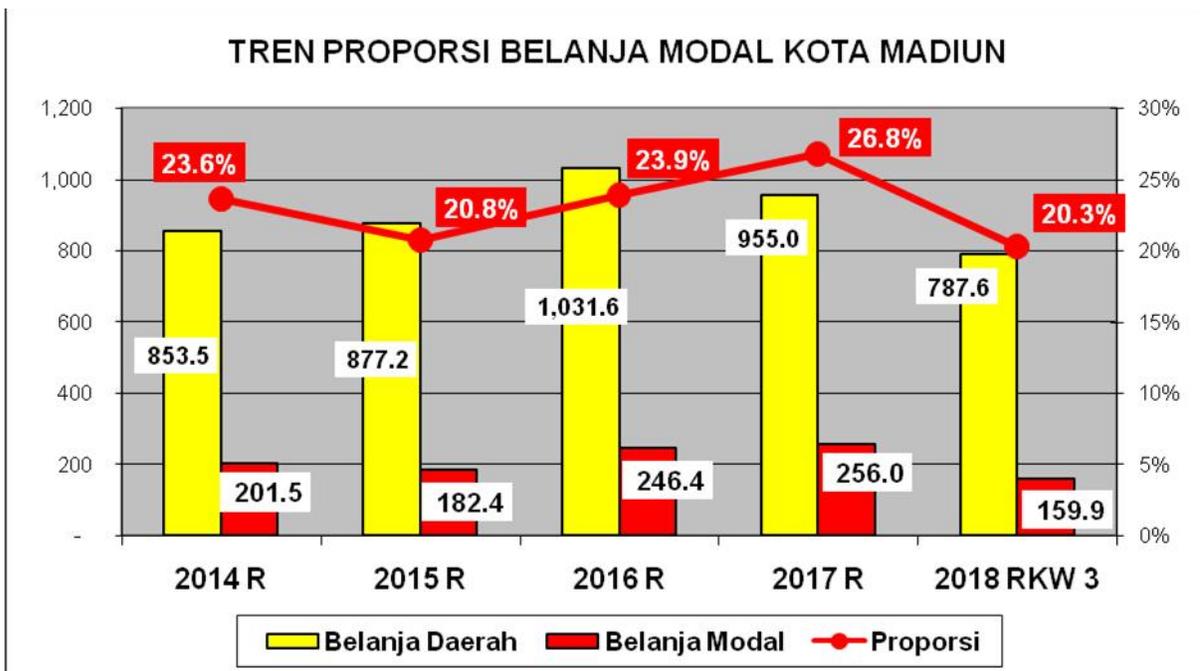
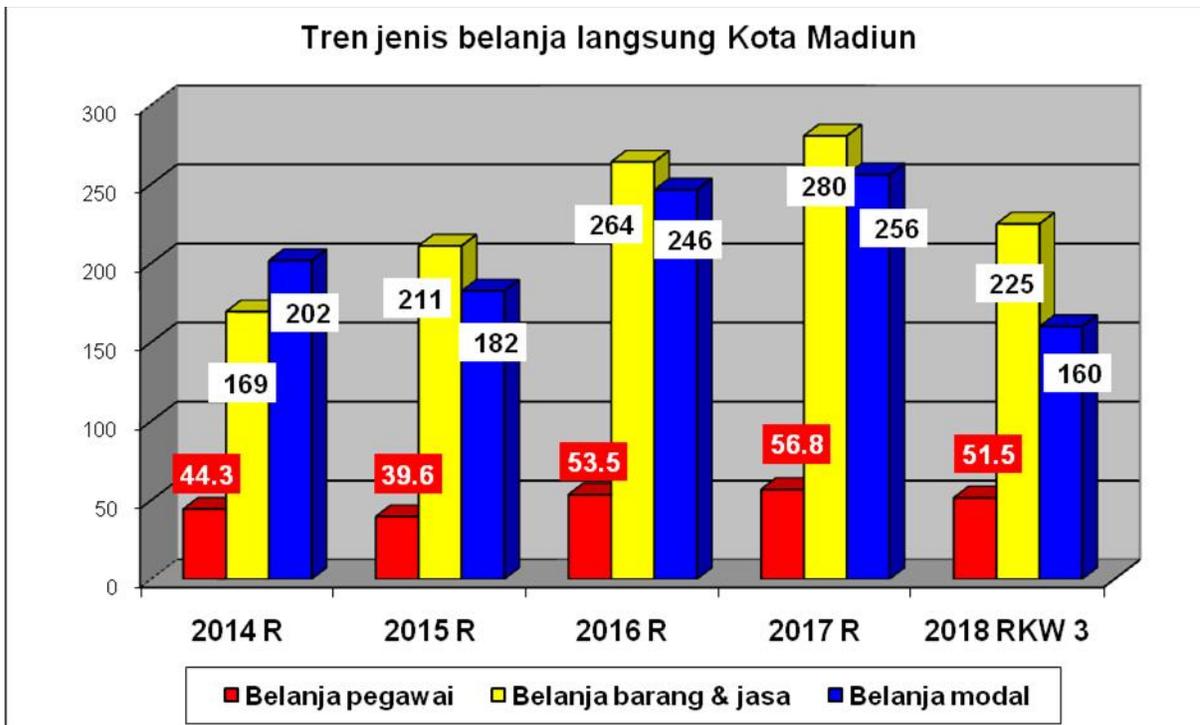
- Tren komposisi belanja tidak langsung dengan belanja langsung semakin membaik, yaitu sampai dengan tahun 2017 dari total belanja daerah 37,9% untuk belanja tidak langsung dan 62,1% nya untuk belanja langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja untuk pembiayaan program dan kegiatan yang secara langsung dapat dikontrol kinerjanya semakin besar, dengan demikian pemerintah daerah akan lebih cepat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, karena dana untuk pembiayaan program dan kegiatannya dari sisi prosentase semakin besar.



- Moratorium pengangkatan PNS telah berdampak positif bagi kesehatan keuangan daerah Kota Madiun, dimana belanja pegawai (Kelompok BTL) yang dipergunakan untuk Gaji dan tunjangan PNS (termasuk Walikota, Wawali serta DPRD), tren prosentasenya terhadap belanja daerah semakin menurun. Tahun 2014 masih 48,5% dari total belanja daerah, sedangkan tahun 2017 belanja pegawai PNS dan lainnya tersebut menjadi 35,1% (dibawah 40%) dari total belanja daerah, artinya keuangan daerah Kota Madiun semakin tahun semakin sehat. Atas semakin sehatnya keuangan daerah tersebut tentu merupakan peluang yang berharga bagi Kota Madiun untuk mengelola keuangannya lebih terarah, fokus dan terukur sesuai permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Logikanya dengan mampu ditekannya belanja pegawai akan meningkatkan ruang fiskal daerah, ruang fiskal yang semakin lebar menunjukkan kemampuan menyediakan belanja untuk pembangunan (belanja program/kegiatan) semakin besar.



- Struktur belanja langsung lebih banyak dipergunakan untuk **belanja yang kurang produktif**, dimana belanja modal selalu lebih kecil alokasinya dibanding belanja Barang Jasa ditambah belanja pegawai. Kebijakan tersebut kurang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan kebutuhan infrastruktur dasar publik. **Perlu dikaji** apakah infrastruktur dasar publik Kota Madiun sudah cukup memadai, merata dan sesuai standart karena apabila belum, maka kebijakan tersebut patut untuk ditinjau ulang.
- Struktur alokasi belanja langsung harus lebih besar untuk belanja modal sampai keutuhan akan infrastruktur kota yang memadai dan terstandarisasi, minimal standar nasional selanjutnya meningkat menjadi standar internasional.
- Berikut data tren realisasi jenis belanja langsung Kota Madiun Tahun 2013-2017 dan realisasi 2018 kuartal 3, hasil olah data realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2013 - 2017.



Rekomendasi:

- Atas proporsi belanja daerah (keseimbangan belanja tidak langsung dan belanja langsung) yang semakin membaik tentu patut diapresiasi. Untuk itu kebijakan belanja daerah yang dimaksudkan untuk peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas supaya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Namun demikian untuk proporsi belanja langsung yang belum produktif agar memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah daerah, dengan cara perubahan orientasi belanja langsung yang lebih besar dipergunakan untuk belanja modal dari pada belanja barang jasa dan honorarium pegawai.

- Meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui :
 1. Menyediakan informasi data/dokumen perencanaan dan anggaran kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website Pemerintah Kota Madiun, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data perencanaan dan anggaran daerah.
 2. Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (musrenbang kelurahan – Kecamatan dan Kota) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat.
 3. Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum OPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD)
- Target dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) hendaknya menjadi dasar pengalokasian anggaran utamanya pada OPD urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM seharusnya juga terus dikembangkan dan diperluas penerapannya sehingga menjadi strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dasar di Kota Madiun.
- Kebijakan belanja daerah tahun 2019 hendaknya diorientasikan pada percepatan pencapaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD yaitu:
 - a) *Konsentrasi anggaran tahun 2019 hendaknya diarahkan untuk percepatan tujuan dan sasaran daerah yang sampai tahun 2018 belum mencapai target RPJMD.*
 - b) *Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat (berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat).*
 - c) *Meningkatkan kapasitas belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi, pemenuhan infrastruktur publik dan pemberdayaan masyarakat, dengan menitik beratkan pada kualitas bukan kuantitas.*
 - d) *Meningkatkan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan mempertahankan WTP, penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan standart belanja pada APBD .*

- Sama dengan pelaporan Pendapatan Daerah, pada laporan realisasi belanja daerah tidak dapat diketahui permasalahan dan solusi pengelolaan belanja daerah antara Tahun Anggaran 2014 – 2018, karena minimnya informasi tentang identifikasi masalah dan solusi yang disajikan. Akibatnya tidak diketahui hambatan dan tantangan pengelolaan belanja daerah selama ini. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Madiun dapat menggali lebih dalam tentang apa permasalahan dan solusi pengelolaan belanja daerah Kota Madiun selama kurun Tahun 2014-2019 dari sisi *good governance* APBD seperti: Regulasi keuangan daerah, penatausahaan dan pelaporan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Seharusnya jika permasalahan dan solusi pengelolaan APBD periode RPJMD yang lalu dapat diidentifikasi, maka akan menjadi dasar rumusan perbaikan kebijakan anggaran untuk RPJMD tahun yang akan datang.

IV. EVALUASI KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN MISI DAERAH

Oleh karena Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) merupakan pertanggung jawaban akhir masa jabatan, maka pengukuran capaian kinerja seharusnya dimaksudkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja tujuan dan sasaran dari visi dan misi daerah. Disamping itu juga selama periode Tahun 2014 – 2018 Pemerintah Kota Madiun telah merubah RPJMDnya. Untuk itu analisis atas capaian kinerja setiap Misi daerah pada LKPJ AMJ pengukurannya sesuai dengan RPJMD Perubahan Bab V tabel 5.1 tentang **Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2014-2019**, artinya sejauhmana capaian keberhasilan/kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan serta sasaran daerah setiap tahunnya, dapat menggunakan pengelompokan sesuai RPJMD Perubahan bab V tersebut, berikut hasilnya:

Visi:

“TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Misi:

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan perubahan RPJMD yang baru, terdapat perubahan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran kinerja instansi pemerintah atas program dan kegiatan yang didanai oleh APBD yang disesuaikan dengan kepentingan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Penetapan indikator kinerja ditentukan melalui pohon kinerja (*cascading*) pencapaian misi pembangunan daerah yang diturunkan dari visi – misi – tujuan – indikator tujuan – sasaran – indikator sasaran sebagaimana gambaran di bawah ini.

No	MISI	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat pada	Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Publik	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

No	MISI	Tujuan	Sasaran
4	Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja
			Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah
			Meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah
			Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
		Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya
		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	

Melalui penelusuran Bab V RPJMD perubahan Kota Madiun Tahun 2014-2019 tentang Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja, untuk mengukur keberhasilan 4 misi tersebut terdapat **7 Tujuan, 14 sasaran serta 29 indikator beserta target kerjanya**. Dengan rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing misi sebagai berikut:

Misi	Jumlah
1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	3
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	4
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	11
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	11
Jumlah	29

Dari 29 indikator pengukuran kinerja setiap misi dalam dokumen RPJMD, seluruhnya telah dilaporkan capaian kinerjanya dalam LKPJ AMJ, disajikan dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Hasil olah data dokumen LKPJ AMJ pada capaian Indikator kinerja sasaran berdasarkan kelompok misi daerah adalah sebagai berikut :

- Sampai dengan tahun 2018 semester 3 (tiga), indikator Misi yang mencapai/melampaui target sebanyak 25 indikator (tingkat ketercapaian 86,2%) artinya dari 29 indikator kinerja sampai dengan Tahun Anggaran 2018 kuartal tiga, sebanyak 86,2% telah mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sisanya sebanyak 4 indikator belum mencapai target. Rekapitulasi capaian 2018 selengkapnya sebagaimana yang telah direkap dalam tabel berikut:

Indikator Kinerja berdasarkan Misi Daerah
Tahun 2018

Misi	Jumlah	Tercapai	Belum tercapai	%
1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	3	3	-	100%
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	4	3	1	75%
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	11	10	1	90,9%
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	11	9	2	81,8%
Jumlah Indikator	29	25	4	86,2%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja Misi daerah dalam RPJMD sampai dengan tahun ke empat RPJMD, yaitu LKPJ AMJ tahun 2018, bahwa:

- **Berhasil dengan prestasi membanggakan memenuhi/melampaui target indikator kinerja misi ke 1, 3 dan 4** yaitu : Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat dan meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat (mencapai/melampaui target 100%, 90,9 dan 81,8%).
- **Berhasil dengan prestasi sedang/cukup memenuhi target indikator kinerja misi ke 2 (dua)** yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (capaian 75%).

Adapun 4 indikator yang belum memenuhi target tersebut, , meliputi:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Rata-rata Lama Sekolah
3. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB
4. Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB

Sedangkan Capaian indikator per urusan pembangunan, sebagai berikut :

Urusan	Jumlah	Tercapai	Belum tercapai*	%
1. Pendidikan	25	25	-	100%
2. Kesehatan	36	33	3	91,66%
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	21	-	100%
4. Sosial	7	7	-	100%
5. Perumahan Rakyat dan Permukiman	14	14	-	100%
6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16	16	-	100%
7. Pangan	5	5	-	100%
8. Ketenagakerjaan	11	11	-	100%
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	8	-	100%
10. Pertanahan	2	2	-	100%
11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	8	1	88,88%
12. Lingkungan Hidup	15	12	3	80%
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	4	1	80%
14. Perhubungan	17	14	3	82,35%
15. Komunikasi dan Informatika	20	19	1	95%
16. Koperasi dan UKM	9	9	-	100%
17. Penanaman Modal	10	10	-	100%
18. Kepemudaan dan Olah Raga	12	12	-	100%
19. Statistik	3	3	-	100%
20. Kebudayaan	10	10	-	100%
21. Perpustakaan	5	5	-	100%
22. Kearsipan	3	3	-	100%
23. Kelautan dan Perikanan	3	3	-	100%
24. Pariwisata	4	4	-	100%
25. Pertanian	16	16	-	100%
26. Perdagangan	9	8	1	88,88%
27. Perindustrian	7	6	1	85,71%
28. Transmigrasi	2	2	-	100%
29. Unsur Staf	23	20	3	86,95%
30. Pengawasan	3	3	-	100%
31. Pendidikan dan Pelatihan	7	6	1	85,71%
32. Keuangan	10	7	3	70%
33. Perencanaan	16	16	-	100%
34. Penelitian dan Pengembangan	1	1	-	100%
35. Kecamatan	13	13	-	100%
36. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11	11	-	100%
Jumlah	388	367	21	94,58%

Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ AMJ

*Data sementara sampai dengan Bulan November 2018

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) ini periode tahun 2014 – 2019 data capaian yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) hanya sampai bulan Nopember 2018, maka dalam LKPJ AMJ juga harus diukur sejauhmana peluang beberapa indikator sampai dengan tahun 2019 akan mencapai target dan atau yang diragukan akan tercapai (sulit mencapai Target). Maka jika menggunakan logika dokumen LKPJ AMJ tersebut, analisis selanjutnya adalah mengukur seberapa besar peluang seluruh target kinerja tahun 2019 akan terpenuhi. Dari hasil olah data didapat hasil analisis sebagai berikut:

Peluang indikator kinerja Misi memenuhi targetnya pada tahun 2019

Misi	Akan tercapai	Sulit tercapai	Jumlah	% akan tercapai
Misi 1: Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	3		3	100%
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	3	1	4	75,0%
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	10	1	11	90,9%
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	10	1	11	90,9%
Jumlah	26	3	29	89,7%

- Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2019 kelak (sesuai periode RPJMD 2014 – 2019) jumlah indikator yang telah mencapai dan akan mencapai target kinerja sebesar 26 indikator dari total 29 indikator, dengan tingkat ketercapaian sebesar 89,7%. Sisanya sebanyak 3 indikator 10,3% nya diragukan (sulit) sampai akhir RPJMD tahun 2019 target kinerja akan tercapai.
- Adapun 3 indikator berdasarkan pertumbuhan capaian indikator Tahun 2014 – 2018, untuk target 2019 di prediksi sulit mencapai target, meliputi:
 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
 2. Rata-rata Lama Sekolah
 3. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB

Berikut disajikan dalam matrik hasil olah datanya:

Status target indikator tahun 2019 yang diprediksi sulit/diragukan mencapai target

Misi	SASARAN	INDIKATOR	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018*	Target 2019	Rata_rata Pertumbuhan realisasi (4Th)	Status Capaian 2019
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	B	B	B	B	A	0,00%	sulit tercapai
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,08 Tahun	10,09 Tahun	11,10 Tahun	11,10 Tahun*	12 Tahun	0,00%	sulit tercapai
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	23,41%	23,23%	23,21%	23,21%	23,80%	-0,21%	sulit tercapai

Perhitungan status target indikator kinerja tahun 2019 (tahun akhir RPJMD), secara lengkap disajikan dalam bentuk matrik berikut ini:

Status target indikator tahun 2019

Misi	SASARAN	INDIKATOR	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018*	Target 2019	Rata-rata Pertumbuhan realisasi (4Th)	Status Capaian 2019
Misi 1: Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	108	108 kelompok	108 kelompok	109	108 kelompok	0,23%	akan tercapai
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81	82,23	83,02	83	82,5	0,61%	akan tercapai
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,97	92,95	93,66	93,66	93,8	0,19%	Akan tercapai

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintah daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	N/A	Sanga t Tinggi	Sangat Tinggi	0,00%	akan tercapai
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	B	B	B	B	A	0,00%	sulit tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,84	78,54	79,57	82,85	79,5	1,57%	akan tercapai
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	0,00%	akan tercapai
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,08 Tahun	10,09 Tahun	11,10 Tahun	11,10 Tahun *	12 Tahun	0,00%	sulit tercapai
		Angka Harapan Lama Sekolah	14,06	14,19	14,2	14,2	14,15	0,25%	akan tercapai
		Angka Melek Huruf	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	akan tercapai

	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,41	72,44 Tahun	72,48 Tahun	72,54	73,31 Tahun	0,04%	akan tercapai
		Angka Kematian Ibu (AKI)	0	38,37%	0%	0%	38,59%	0,00%	akan tercapai
		Angka Kematian Bayi (AKB)	6,75%	7,29%	7,36%	6,30%	6,95%	1,71%	akan tercapai
	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	89,15%	92,41%	92,58%	94,20 %	93%	1,39%	akan tercapai
		Rasio Rumah layak Huni	99,21%	98,37%	99,00%	99,65 %	99,42%	0,11%	akan tercapai
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	0,07%	0,30%	1,60%	2,20%	1,50%	136,77%	akan tercapai
	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,04	55,48	61,42%	63,90 %	68,51%	-67,02%	akan tercapai
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15,08%	18,88%	19,01%	19,48 %	19%	6,61%	akan tercapai

Misi 4: Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Nilai realisasi Investasi	1.537,88 M	347,348 M	1,388 T	945.999	361 M	#VALUE!	akan tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,10%	5,12%	4,68%	1,13%	5,08%	1,71%	akan tercapai
	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	23,41%	23,23%	23,21%	23,21 %	23,80%	-0,21%	sulit tercapai
		Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	17,14%	17,34%	17,68%	17,69 %	17,20%	0,79%	akan tercapai;
	Meningkatnya Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB	15,76%	15,87%	15,99%	16,12 %	16,54%	0,57%	akan tercapai

	perekonomian daerah								
	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	67,79	69,62	183,03	183,38	46,5	28,25%	akan tercapai
		PDRB Perkapita	58,24	61,39	68,94	68,94	70,84	4,31%	akan tercapai
		Indeks Gini	0,34	0,42	0,36	0,36	0,32	1,44%	akan tercapai
	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	akan tercapai
	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	akan tercapai
		Angka pelanggaran ketertiban umum	98,36%	94,72%	98,01%	98,83%	98%	0,12%	akan tercapai

Rekomendasi:

- Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator misi daerah sebagaimana tabel diatas **direkomendasikan** agar capaian akhir RPJMD Tahun 2014-2019 sesuai target, maka program dan kegiatan serta pendanaan APBD Tahun 2019 sebagai tahun akhir RPJMD hendaknya di prioritaskan/diarahkan alokasinya untuk pencapaian indikator kinerja pada **Tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 diproyeksi sulit mencapai target yaitu :**

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Rata-rata Lama Sekolah
3. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB.

Diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kualitas manajemen program dan kegiatan, dengan dukungan anggaran yang memadai di tahun 2019 pada tujuan dan sasaran yang target indikator kerjanya diragukan/sulit akan tercapai pada tahun 2019 tersebut.

V. EVALUASI KINERJA BERDASARKAN ASPEK PEMBANGUNAN DAERAH.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya diukur dari Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah terbagi dalam 3 aspek yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2. Aspek Pelayanan Umum
3. Aspek Daya Saing Daerah

Artinya setiap tahun dan akhir masa jabatan, evaluasi penyelenggaraan Otonomi daerah diukur dari sejauhmana capaian setiap daerah mampu meningkatkan 3 aspek tersebut, tentu dengan berbagai indikator kerjanya.

Hasil penelusuran atas dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019 Kota Madiun pada Bab IX tentang penetapan indikator kinerja daerah, bahwa berdasarkan aspek pembangunan telah ditentukan jenis indikator dan targetnya. Jumlah seluruh indikator sebanyak 388 indikator, dengan rincian per aspek sebagai berikut :

Aspek	JUMLAH INDIKATOR
Aspek kesejahteraan masyarakat	26
Aspek pelayanan umum	327
Aspek daya saing daerah	35
Jumlah	388

- Hasil olah data dokumen LKPJ AMJ pada Bab IV dari total indikator berdasarkan aspek pembangunan, sebanyak 388 Indikator kinerja telah di laporkan capaian kinerjanya. Hasilnya sampai dengan bulan Nopember 2018 indikator yang mencapai/melampaui target sebesar 367 indikator (tingkat ketercapaian 94,58%), sisanya sebanyak 21 indikator tidak mencapai target. Rekapitulasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Capaian Aspek Pembangunan Daerah Tahun 2018

Aspek	Jumlah	Tercapai	Belum tercapai	%
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	26	25	1	96,15%
Aspek Pelayanan Umum	327	312	15	95,41%
Aspek Daya Saing Daerah	35	30	5	85,71%
Jumlah	388	367	21	94,58%

Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ AMJ

- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja berdasarkan aspek pembangunan daerah, sampai dengan tahun ke empat RPJMD yaitu LKPJ AMJ tahun 2018, bahwa: **Pemerintah Kota Madiun Berhasil dengan prestasi membanggakan memenuhi/melampaui seluruh target indikator kinerja berdasarkan ke tiga aspek pembangunan daerah.**

- Dengan metode yang sama digunakan untuk pengukuran Misi, maka karena pertanggungjawaban LKPJ AMJ ini periodenya tahun 2014 – 2019 sedangkan tahun anggaran sekarang masih berlangsung paling tidak 1 (satu) tahun lagi untuk sampai pada tahun 2019, maka dalam LKPJ AMJ dapat diprediksi beberapa indikator yang akan mencapai target dan juga indikator yang tahun 2019 diragukan akan tercapai atau sulit mencapainya. Berikut rekapitulasi hasil analisis nya :

Aspek	Akan tercapai	Sulit Tercapai	Jumlah	% akan tercapai
ASPEK DAYA SAING DAERAH	37		37	100%
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	24	1	25	96%
ASPEK PELAYANAN UMUM	322	4	326	99%
Jumlah	383	5	388	99%

- Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2019 kelak (sesuai periode RPJMD 2014 – 2019) jumlah indikator yang telah mencapai dan akan mencapai target kinerja sebesar 383 indikator dari 388 indikator dengan tingkat ketercapaian sebesar 99%. Sisanya sebanyak 5 indikator atau 1% nya sampai akhir tahun 2019, diragukan akan mencapai target kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJMD.
- Adapun 5 indikator berdasarkan ke tiga aspek pembangunan yang diragukan akan mencapai target pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 1. Pertumbuhan Ekonomi
 2. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
 3. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN
 4. Jumlah populasi ternak
 5. Nilai Akuntabilitas Kinerja
- Perhitungan status target indikator kinerja berdasarkan aspek pembangunan tahun 2019 (tahun akhir RPJMD), secara lengkap disajikan dalam bentuk metrik berikut ini:

Aspek	Urusan	Indikator	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	T 2019	Rata- rata Pertumbu han realisasi (4Th)	Status Capaian
ASPEK KESEJAH TERAAN MASYARA KAT	Otonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6,15	5,9	5,93	5,96	6,80	-0,78%	Sulit Tercapai
ASPEK PELAYANAN UMUM	Perhubu ngan	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	#1=30.000 #2=35.000 #3=45.000 #4=50.000	#A=65.000 #B=70.000 #C=80.000 #D=85.000	#1=65.000 #2=70.000 #3=80.000 #4=85.000	#1=65.000 #2=70.000 #3=80.000 #4=85.000	#1=30.000 #2=35.000 #3=45.000 #4=50.000	#VALUE!	Sulit Tercapai
	Penanam an Modal	Kenaikan/penu runan nilai realisasi PMDN	317%	-77,41%	74,98%	-31,87%	100	#NUM!	Sulit Tercapai
	Pertanian	jumlah populasi ternak	98.732	93.658	89.562	85.813	103000	-3,45%	Sulit Tercapai
ASPEK PELAYANAN UMUM	Unsur Staf	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	A	0,00%	Sulit Tercapai

VI PROGRES PENYELESAIAN DAN PEMENUHAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.

Sebagaimana yang di tetapkan dalam RPJMD Kota Madiun pada Bab IV tentang Analisis Isu Strategis, bahwa telah diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang merupakan “*expectation gap*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Logikanya permasalahan pembangunan tersebut telah ditangani melalui program dan kegiatan selama lima tahun periode 2014 – 2019, demikian juga dengan isu strategis daerah. Adapun permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana dalam RPJMD Bab IV sebagai berikut :

Isu isu strategis Kota Madiun 2014 – 2019
1. Tingkat kemiskinan perkotaan rendah namun pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih kurang optimal
2. Tata kelola pemerintahan masih terbatas yang diindikasikan oleh beberapa indikator yang belum tercapai
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas
4. Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat namun belum berkualitas khususnya pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat
5. Daya saing Kota Madiun masih perlu ditingkatkan

Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

1. Masih adanya sektor strategis yang memiliki potensi ekonomi yang belum dikelola secara optimal, seperti sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan jasa.
2. Masih minimnya ruang publik dan kawasan untuk pengembangan sektor perindustrian.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas.
4. Keterbatasan lahan perkotaan, sehingga menjadikan salah satu penyebab terjadinya kepadatan lalu lintas yang terus meningkat.
5. Pangaturan lahan untuk lahan parkir kendaraan masih belum tertangani secara maksimal.
6. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan konsentrasi sentral jasa, perdagangan dan perindustrian dengan kawasan permukiman penduduk perkotaan
7. Lapangan kerja yang masih terbatas dan angka pengangguran yang

relatif masih tinggi.
8. Masih adanya potensi ekonomi lokal dibidang kerajinan lokal dan kuliner yang belum terwadahi dan diberdayakan secara optimal.
9. Tingkat kemiskinan perkotaan rendah namun pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih kurang optimal.
10. Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat, namun belum berkualitas khususnya pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat.
11. Daya saing Kota Madiun masih perlu ditingkatkan.
12. Karakteristik, identitas, dan icon kota yang belum menonjol.
13. Tata kelola pemerintahan masih terbatas yang diindikasikan oleh beberapa indikator yang belum tercapai.
14. Penegakan regulasi daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15. Masih terdapat degradasi budaya dan sosial di masyarakat.

- Selain pengukuran ketercapaian indikator Visi dan Misi, tujuan dan sasaran daerah serta aspek pembangunan. Seharusnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Wali Kota Madiun Periode Tahun 2014-2019 dapat juga mengukur sejauhmana penyelesaian dan pemenuhan permasalahan isu strategis daerah seperti yang sebagian dikutip tersebut diatas. Namun setelah ditelusuri lebih mendalam belum diketemukan kesimpulan atas penyelesaian permasalahan dan isu strategis tersebut. Oleh karena itu **direkomendasikan** agar Pemerintah Kota Madiun menggali data/informasi, sejauh mana penyelesaian dan pemenuhan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang telah diidentifikasi sesuai Bab IV RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 tersebut. Dengan demikian maka *progress report* penyelesaian permasalahan dan isu strategis dapat di ketahui, yang selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar perumusan permasalahan pembangunan dan isu stregis pada RPJMD 5 (lima) tahun yang akan datang atau RPJMD Kota Madiun periode tahun 2019 – 2024.

Demikianlah Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Madiun Periode Tahun 2014- 2019 yang dapat kami sampaikan. Tentunya kita sadari bersama bahwa rekomendasi yang telah disampaikan ini merupakan salah satu manifestasi kepedulian kita terhadap perbaikan pembangunan Kota Madiun ke depan, agar program pembangunan daerah Kota Madiun terselenggara dengan baik.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

Drs. ISTONO, M.Pd